

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2013-2017 telah selesai dilaksanakan. Renstra ini disusun berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan.

Renstra ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh untuk lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*). Renstra ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renstra ini dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.

Banda Aceh, Oktober 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Banda Aceh

Syaridin S.Pd.M.Pd
Nip. 19701231 199512 1 033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1 Tugas, Fungsi.....	10
2.2 Sumber Daya.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI....	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	22
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Dinas.....	23
3.3 Isu –Isu Strategi	24
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	31
4.1 Visi dan Misi.....	31
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	31
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	33

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	34
BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	46
BAB VII PENUTUP.....	51

Lampiran- lampiran :

1. Tabel 2.1 Pencapaian Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Banda Aceh
2. Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
3. Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
4. Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang cerdas, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sejalan dengan konsep tersebut, dalam kerangka otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan sektor pendidikan dari berbagai aspeknya merupakan kewajiban Pemda Kota Banda Aceh. Pembangunan memiliki ciri yang sedikit berbeda dengan pembangunan sektor lain. Objek pembangunannya adalah manusia dengan berbagai keunikan sifat/prilaku, kebutuhan, dan tuntutannya. Tujuan pembangunannya juga bukan untuk menyediakan, memperlancar, memenuhi sesuatu, dll. Seperti tujuan-tujuan sektor lainnya, melainkan mengembangkan SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Pengembangan kualitas SDM tidak dapat dilakukan sekaligus dan sekali jadi, seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran PDAM, dsb. Proses pembangunan harus dilakukan secara berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan. Pembangunan pendidikan adalah sesuatu yang paling mendasar dari keseluruhan sektor pembangunan yang diperlukan manusia karena dibutuhkan oleh semua masyarakat, dan sekaligus sebagai tolok ukur dasar pembangunan sektor lainnya.

Pembangunan sektor pendidikan memiliki banyak variabel dan masing-masing variable sangat kompleks dan rumit sifatnya. Oleh sebab itu, pembangunan sektor pendidikan memerlukan perencanaan yang mendekati benar, harus sangat rinci, teliti, kritis, dan strategis. Untuk itulah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh menyusun suatu rencana strategis (yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD) sesuai dengan situasi, kondisi lingkungan, tujuan, dan cita-cita yang hendak dicapai. Tujuan dan cita-cita yang dimaksud dalam Renstra-SKPD ini adalah jabaran makna dari Visi dan Misi Walikota terpilih periode 2012-2017.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan Visi pembangunannya sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017, adalah ***‘Banda Aceh Model Kota Madani’*** dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Banda Aceh tersebut ditempuh melalui tujuh misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan.
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas,sehat dan sejahtera yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan,tehnologi, seni dan budaya
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik,perlindungan anak dan kelompok marginal.
7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan Kota Banda Aceh diharapkan menjadi kota yang penduduknya mempunyai peradaban yang tinggi, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu SKPD pemerintahan Kota Banda Aceh, mempunyai tugas dan fungsi, serta tanggung jawab yang cukup berat dalam pembangunan sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh mengelola satuan PAUD formal/nonformal (TK dan KB) dan pendidikan nonformal (PKM, Pemberantasan Buta Aksara, dan paket-paket belajar), pendidikan luar Biasa (PLB), satuan pendidikan dasar (SD dan SMP), satuan pendidikan menengah atas (SMA dan SMK) serta bidang Pemuda dan Olahraga. Untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan kepada semua anak usia sekolah dalam wilayah Kota Banda Aceh, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersinergi dengan Mapenda Depag Kota Banda Aceh sebagai pengelola RA dan TPQ, MI, MTs, dan MA.

Untuk itu, seyogyanya semua komponen pelaku pembangunan diharapkan dapat berkiprah menurut perannya masing-masing dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Dalam hal ini, semua pihak perlu membangun dan menyatukan komitmen, bahwa pengembangan SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai sangat diperlukan sebagai pendukung pembangunan Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang. Pembangunan pendidikan merupakan sarana utama dalam mengimplementasikan komitmen tersebut. Oleh karena itu, semua komponen (pemerintah, masyarakat, alim-ulama, dan usahawan) mau bekerja sama secara sinergis dan mau mendukung tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang, terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan dengan didukung oleh berbagai pihak/*stakeholders* dalam suatu kurun waktu yang terukur, yang tertuang dalam Renstra-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.

1.2. Landasan Hukum

Renstra-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran pengelola pendidikan di Kota Banda Aceh serta instansi lainnya yang terkait dalam merumuskan kebijakan, merencanakan, mengimplementasikan program/kegiatan, dan memonitoring

serta evaluasi program pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2012-2017. Dengan demikian, akan terbentuk keselarasan tindakan pelayanan pendidikan, baik pada tataran internal maupun pada tataran eksternal.

Tujuan penyusunan Renstra-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan tata nilai kelembagaan beserta substansi kewenangan (Tupoksi) kedinasan.
2. Mengarahkan dan mengelola kekuatan SDM pendidikan yang ada dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan serta tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan layanan pendidikan yang berorientasi pada hasil.
3. Menyusun tujuan, sasaran/target, kebijakan, dan strategi pelaksanaan program untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.
4. Menyusun program-program strategis yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh dan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NAD sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh sebagai dasar perencanaan program jangka menengah (5 Tahun) serta perencanaan anggaran.
5. Menyusun program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).
6. Menyusun tolok ukur evaluasi pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk satu periode perencanaan (5 tahun).
7. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Pimpinan secara proporsional.
8. Menyusun alat/instrumen, baik untuk memonitoring pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk mengevaluasinya untuk setiap tahun maupun untuk lima tahunan.

1.4. Sitematika Penulisan

Renstra-SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 terdiri atas Enam Bab, Yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Dinas
- 3.3 Isu –Isu Strategi

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendidikan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dalam bidang pendidikan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan. Sekretariat terdiri atas Tiga Sub Bagian yaitu Sub bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan yang Mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;

- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan dasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan tingkat TK, SD dan MI;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan tingkat TK, SD dan MI;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan tingkat TK, SD dan MI;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan tingkat TK, SD dan MI;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan tingkat SMP dan MTsN;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan tingkat SMP dan MTsN;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pendidikan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Menyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan menengah SMA/K dan MAN;
- b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan menengah SMA/K dan MAN;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan menengah SMA/K dan MAN;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan menengah SMA/K dan MAN;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Luar biasa dan luar Sekolah

Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan luar sekolah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang pendidikan luar sekolah mempunyai fungsi :

- a. Menyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan luar sekolah;

- b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan luar sekolah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan luar sekolah;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan luar sekolah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang program dan pengembangan SDM. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang ini mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program dan pengembangan SDM;
- b. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program dan pengembangan SDM;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang program dan pengembangan SDM;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang program dan pengembangan SDM;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemuda dan olahraga. Bidang mempunyai tugas dan fungsi sbb:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- b. Melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- c. Mengkoordinir pembinaan dan pengembangan bibit-bibit unggul dalam bidang olahraga;
- d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendataan terhadap potensi kepemudaan dan olahraga;
- e. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

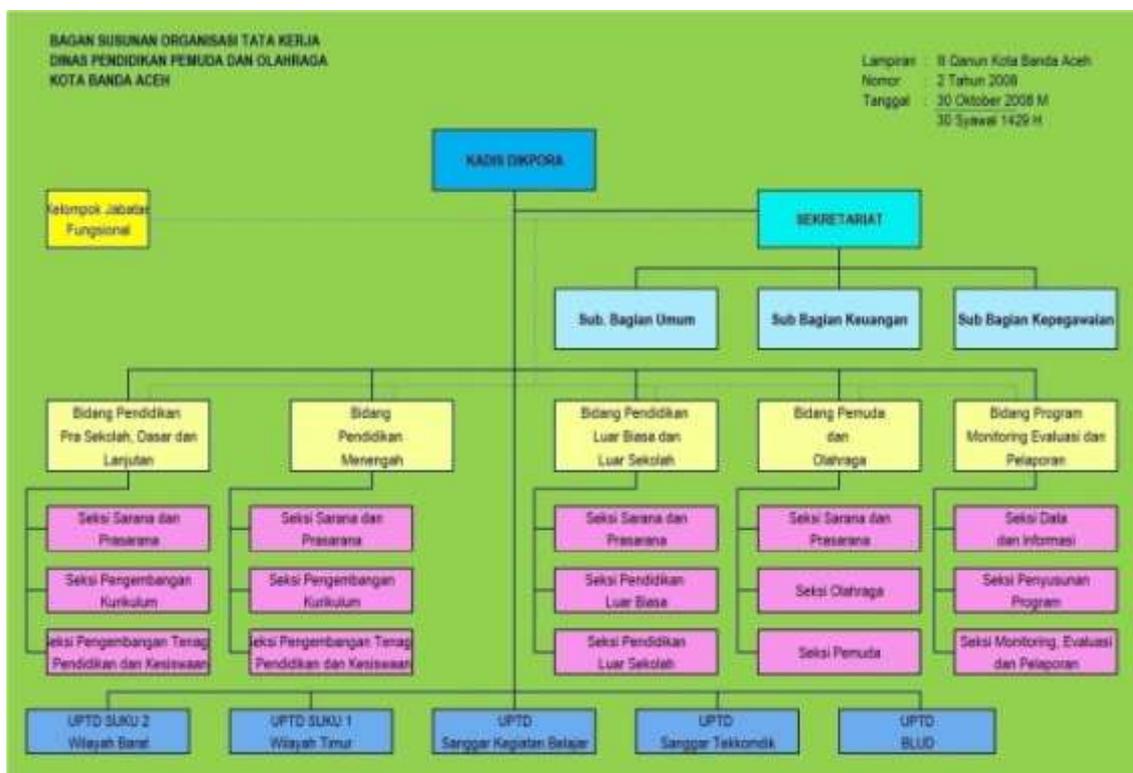
Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah berfungsi melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan makro/umum pemerintah daerah Kota Banda Aceh di bidang isi, proses, dan hasil pendidikan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana, serta membina hubungan kerja dengan seluruh organisasi perangkat daerah.

Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga berfungsi sebagai pengorganisasian kegiatan kependidikan, pemuda dan olah raga yang keberadaannya

menjadi simbol supremasi kegiatan pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 02 tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh berarti telah mempertegas peran dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh di era otonomi daerah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh adalah unsur instansi pemerintah Kota Banda Aceh dibidang pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Banda Aceh melalui Sekretaris Daerah (dalam pelaksanaannya sesuai draf SOTK).



1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian,
 - c. Sub Bagian Keuangan,

3. Bidang Pendidikan Pra Sekolah Dasar dan lanjutan, membawahi :
 - a. Seksi sarana dan prasarana
 - b. Seksi pengembangan kurikulum
 - c. Seksi pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi sarana dan prasarana
 - b. Seksi pengembangan kurikulum
 - c. Seksi pengembangan tenaga pendidik dan kesiswaan
5. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah, membawahi :
 - a. Seksi sarana dan prasarana
 - b. Seksi Pendidikan luar biasa
 - c. Seksi Pendidikan luar sekolah
6. Bidang Program, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan membawahi :
 - a. Seksi data dan informasi
 - b. Seksi penyusunan program
 - c. Seksi Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :
 - a. Seksi pemuda
 - b. Seksi Olah raga
 - c. Seksi sarana dan prasarana
8. UPTD : 2 Unit (9 Kecamatan)
9. UPTD SKB dan UPTD Tekkomdik
10. Kelompok Jabatan Fungsional/ Pengawas

2.2 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh didukung oleh sumber daya manusia dengan susunan organisasi sebagai berikut.

Tabel 1
Rekapitulasi Susunan Sumber Daya Pegawai dan Guru
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Banda Aceh Tahun 2012

No	Jabatan	Gol	Jumlah/Orang
A	Tingkat Kota		
	Kepala Dinas	IV	1
	Sekretaris	IV	1
	Kabid Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan	IV	1
	Kabid Pendidikan Menengah	IV	1
	Kabid Pendidikan Luar biasa dan luar Sekolah	IV	1
	Kabid Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	III	1
	Kabid Pemuda dan Olahraga	IV	1
	Kepala Subbag	III	3
	Kepala Seksi	IV	3
	Kepala Seksi	III	12
	Staf / Pelaksana	IV	3
	Staf / Pelaksana	III	34
	Staf / Pelaksana	II	20
	Staf / Pelaksana	I	2
Honorer		1	
	JUMLAH		85 Orang
B	UPTD SUKU I		
	Kepala UPTD	IV	1
	Staf PNS	III	2
	Staf PNS	II	8
	Bukan PNS		1
	JUMLAH		12 Orang
C	UPTD SUKU II		
	Kepala UPTD	III	1
	Staf PNS	IV	1
	Staf PNS	III	1
	Staf PNS	II	8
	JUMLAH		11 Orang

D	UPTD SKB		
	Kepala	III	1
	Staf PNS	IV	3
	Staf PNS	III	16
	Staf PNS	II	2
	Staf PNS	I	1
	Bukan PNS/Honorer		1
	JUMLAH		24 Orang
E	TEKKOMDIK		
	Kepala	III	1
	Staf PNS	III	4
	Staf PNS	II	2
	JUMLAH		7 Orang
F	TENAGA FUNGSIONAL		
	Koordinator Pengawas Sekolah	IV	1 Orang
	Pengawas Sekolah	IV	49 Orang
	Guru TK	II	153 Orang
	Guru TK	III	43 Orang
	Guru TK	IV	96 Orang
	Guru SD	II	185 Orang
	Guru SD	III	204 Orang
	Guru SD	IV	645 Orang
	Guru SMP	II	10 Orang
	Guru SMP	III	272 Orang
	Guru SMP	IV	529 Orang
	Guru SMA	III	331 Orang
	Guru SMA	IV	518 Orang
	Guru SMK	II	2 Orang
	Guru SMK	III	138 Orang
	Guru SMK	IV	270 Orang
	JUMLAH		3304 Orang

Tugas pokok Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Banda Aceh adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan mengkoordinir secara komprehensif seluruh aspek kegiatan pelayanan pendidikan yang meliputi berbagai aspek kesiapan tenaga, kinerja, mutu pelayanan dan mutu guru semakin meningkat.

Adapun sumber daya lainnya bersumber pada asset yang menjadi pendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga didukung dengan sarana dan prasarana/aktiva tetap dengan nilai keseluruhan per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 999.200.166.030.- seperti yang terlihat Pada pada tabel berikut ini;

Tabel 4
 Nilai Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
 Kota Banda Aceh
 berdasarkan kelompok Aset Tetap Tahun 2012

No	Jenis barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	573.730.494.014
2	Peralatan dan Mesin	62.509.282.082
3	Gedung dan Bangunan	334.542.032.069
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	305.940.006
5	Aset Tetap Lainnya	18.112.417.859
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
	Jumlah	999.200.166.030

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa (1) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 62.509.282.082,- yang terdiri dari peralatan kantor, perlengkapan kantor, belanja computer, belanja meubelair, penghias ruangan rumah tangga dan alat kantor lainnya. (2) Gedung dan bangunan sebesar Rp. 344.542.032.069,- yang terdiri dari Gedung kantor dan pagar. (3) asset tanah sebesar Rp. 573.730.494.014,-. Sehingga sampai dengan tahun 2012 total asset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh mempunyai nilai sebesar Rp. 999.200.166.030,-

2.3 Kinerja Pelayanan

Tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan dan mengkoordinir secara komprehensif seluruh aspek kegiatan pelayanan pendidikan yang meliputi aspek kesiapan tenaga, kinerja, mutu pelayanan dan peningkatan kualitas laporan. Untuk itu arah prioritas pembangunan daerah ditujukan pada penguatan layanan pendidikan yaitu dengan terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif, dengan upaya meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu/relevansi layanan pendidikan, serta menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Agar terselenggaranya layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki maka perlu dilihat dari sistem tata kelola, yaitu :

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan Kota
2. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota
3. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota
4. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
5. Tersedianya tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.

Secara detail, pencapaian penyediaan layanan pendidikan dapat dilihat pada tingkatan perjenjang pendidikan.

hBAB III

ISU – ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Untuk mewujudkan misi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menetapkan beberapa strategi yang disusun berdasarkan suatu skala prioritas sebagai berikut :

1. peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan
2. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
3. peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menyadari bahwa amanah menjalankan tugas layanan pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi pendidikan yang telah ditetapkan memerlukan arah/haluan yang jelas yang dalam Rencana Strategis ini dirumuskan dalam tata nilai yang ideal. Penetapan tata nilai dimaksudkan sebagai dasar acuan dan sekaligus sebagai pemberi arah dalam bersikap dan berperilaku semua pihak, baik peserta didik sebagai pelanggan pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah Daerah, staf Dinas Pendidikan sebagai pemberi layanan, maupun masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran semua unsur untuk membangun komitmen dalam usaha mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan.

Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, Majelis pendidik, pengawas, dan staf dinas (input values), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (process values). Nilai-nilai yang wajib ada dalam diri, yang perlu dianut, dan dijadikan acuan oleh semua unsur yang

terkait dengan pelaksanaan layanan pendidikan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh akan menciptakan iklim yang mampu membentuk masyarakat pembaca dan belajar sepanjang hayat untuk mempertinggi derajat hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat dalam rangka pengadiannya kepada Allah Swt.;
2. Dinas pendidikan akan melaksanakan misinya berdasarkan prinsip-prinsip dasar kekhalfahan dengan ciri amanah, teladan, koordinatif dan sinergis, profesional, visioner, inovatif, kreatif disiplin, transparan, dan bertanggung jawab, baik kepada pemerintah, kepada rakyat, maupun kepada Allah Swt.;
3. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas-tugas layanan pendidikan mendorong tumbuhnya motivasi bagi semua unsur di semua jenjang layanan dan memberi kesempatan untuk berinspirasi, berjaya, responsif, produktif, dan antisipatif dalam rangka kesinambungan kerja serta pewarisan estafet tugas pada masa yang akan datang;
4. Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menyelenggarakan pendidikan secara demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada mutu yang tinggi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Dinas

Visi wali kota terpilih, pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 adalah : **Banda Aceh Model Kota Madani**. Kota Madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini

diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab. Oleh karena itu visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh adalah *Menjadi Pengelola Pendidikan Yang Berkualitas, Bermartabat dan Islami*. Sementara itu sesuai dengan misi Walikota, Rencana Jangka Menengah (RPJM) kota Banda Aceh dan pencapaiannya, Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh adalah :

1. Melaksanakan pendidikan yang merata, dan terbebas dari hambatan biaya
2. Melaksanakan pengelolaan lembaga pendidikan yang profesional
3. Melaksanakan program diniyah pada setiap jenjang pendidikan
4. Menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa pada peserta didik
5. Menerapkan Manajemen Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK) dalam akses pendidikan dan pembelajaran (e-education)
6. Melakukan pembinaan bagi pemuda dan cabang Olahraga untuk meujudkan insan yang sehat, sigap dan terampil.

3.3 Isu Strategis

Masyarakat Banda Aceh harus menjadi masyarakat yang cerdas berwawasan luas dan memiliki pendidikan yang baik. Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani serta dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memajukan kehidupannya secara benar sesuai dengan nilai nilai seni dan budaya keaceh-an yang islami sehingga dapat hidup secara bermartabat. Untuk itu masih diperlukannya pengembangan pendidikan, yaitu; Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; Peningkatan Tatakelola, Akuntabilitas, Pencitraan Publik; dan Penerapan Pendidikan Islami, sehingga dicapai akses layanan pendidikan yang

berkualitas. Beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh antara lain :

A. Kebijakan

Perumusan kebijakan ditujukan sebagai batasan dan arah seluruh kegiatan perencanaan dan kegiatan yang akan dilakukan dimasa mendatang. Perumusan berbagai kebijakan tersebut juga sebagai upaya Dinas Pendidikan mengajak, mengatur, mendorong dan memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan melalui berbagai pendekatan. Kebijakan ini yang akan memberikan konfigurasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun konfigurasi Kebijakan yang akan diterapkan antara lain :

I. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.1 Pemerataan dan perluasan Akses.

- a. Penguatan Kelembagaan melalui penyebaran guru PAUD secara merata kepada PAUD yang didirikan oleh masyarakat
- b. Penyediaan layanan TK/RA Pembina disetiap kecamatan dari 3 menjadi 9
- c. Penyediaan biaya Oparsional PAUD khususnya PAUD Negeri

1.2 Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

- a. Peningkatan kompetensi Pendidik PAUD berbasis BCCT (*Beyond Center and Circle Time*)
- b. Pengembangan Alat Permainan Edukasi (APE) dalam dan luar berbasis bahan dasar lokal
- c. Pengembangan kreativitas anak usia dini secara berkesinambungan.

1.3 Penguatan Tata Kelola, akuntabilitas dan citra publik.

- a. Penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas pada semua satuan kerja dan jenjang pendidikan
- b. Pelembagaan hubungan orang tua peserta didik dengan satuan pendidikan PAUD untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

II. Program Sekolah Dasar (SD)

2.1 Pemerataan dan perluasan Akses

- a. Regrouping sekolah dari 137 menjadi 84 sekolah tahun 2007
- b. Pengembangan Sekolah Inklusi pada jenjang SD pada 8 SD
- c. Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu /miskin

2.2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

- a. Implementasi pendekatan pembelajaran yang bercirikan kekhasan, yaitu PAIKEMIS di seluruh sekolah.
- b. Percepatan pengembangan sekolah-sekolah yang berkinerja rendah.
- c. Pengembangan anak-anak berbakat secara berkesinambungan.
- d. Pengembangan sekolah unggul pada masing-masing Gugus
- e. Peningkatan status Sekolah Unggul Daerah secara selektif
- f. Pelaksanaan Diniayah pada sore hari sejak tahun 2011

2.3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

- a. Tidak ada lagi pengangkatan guru SD/MI yang dibiayai oleh APBK mulai dari tahun 2007 kecuali jalur honorer yg terdaftar pada buku putih.
- b. Penguatan hubungan orang tua peserta didik dengan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- c. Peningkatan kinerja pengawas/penilik dan sistem pelaporan secara berkala serta tindak lanjut

- d. Pemberian penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Penyebaran guru secara merata pada setiap sekolah melalui mutasi

III. Program Sekolah Menengah Pertama (SMP)

3.1 Pemerataan dan perluasan akses.

- a. Rehabilitasi ruang kelas pada beberapa SMP yg kondisi ruang kelasnya rusak berat atau tidak layak pakai lagi.
- b. Pergantian mobiler siswa yang rusak/patah
- c. Pemberian beasiswa miskin bagi keluarga tidak mampu secara berkesinambungan.

3.2 Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

- a. Percepatan pengembangan bagi sekolah-sekolah yang berkinerja rendah (sebagai prioritas)
- b. Penambahan sekolah Unggul Daerah
- c. Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) secara on line pada SMP pilot
- d. Pelaksanaan diniyah pada sore hari pada 2013

3.3 Penguatan tata kelola, relevansi dan daya saing.

- a. Penerapan masa jabatan Kepala Sekolah menurut periode sebagai upaya peningkatan kinerja
- b. Penerapan kriteria jabatan Kepala Sekolah sesuai permendiknas no 28 tahun 2010
- c. Penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas pada semua satuan kerja dan jenjang pendidikan.

IV. Program Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

4.1 Pemerataan dan perluasan akses

- a. Penambahan SMA Negeri dari 13 menjadi 16 pada tahun 2012
- b. Penambahan sekolah unggul daerah
- c. Pemberian beasiswa

4.2 Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

- a. Mutasi guru secara merata dan adil
- b. PPDB secara on line
- c. Pengembangan sekolah berstandar internasional.
- d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan pada Pendidikan di SMK Kejuruan.
- e. Percepatan pengembangan bagi sekolah-sekolah yang berkinerja rendah.
- f. Penetapan/Penunjukan SMK sebagai pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal dan berorientasi pasar.

4.3 Tata Kelola

- a. Penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas pada semua satuan kerja dan jenjang pendidikan.

V. Program Pendidikan Non Formal

5.1 Pemerataan dan perluasan Akses

- a. Peningkatan perluasan program kesetaraan untuk Paket B dan C
- b. Meningkatkan Budaya Baca dan percepatan penuntasan Buta Aksara
- c. Penyediaan Lembaga PKBM yang dilengkapi sarana pembelajaran yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran.

- d. Pengembangan Program Life Skill bagi anak putus sekolah dan tidak melanjutkan
- e. Perluasan informasi kepada kaum perempuan di pedesaan tentang gender.

5.2 Peningkatan mutu.

- a. Peningkatan daya dukung (ketenagaan dan pendanaan) yang berasal dari APBK untuk meningkatkan mutu sarana pendidik non-formal.
- b. Percepatan peningkatan kompetensi pendidik pada pendidikan non-formal agar setara dengan pendidikan formal.

5.3 Tata Kelola

- a. Penguatan peran dan fungsi pendidik melalui forum Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-Formal (PTK-PNF)
- b. Penguatan peran dan fungsi penilik PLS melalui forum Kelompok Kerja Penilik PLS (KKPP)
- c. Penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas pada semua satuan kerja dan jenjang pendidikan.

VI. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.1 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkesinambungan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi

1. Rekruiemen calon Kepala sekolah dan Pengawas sekolah sesuai dengan permendiknas no 28 tahun 2010 kerjasama Pemko Banda Aceh dengan LP2KS Solo sejak tahun 2011.
2. Pengembangan KKG/MGMP sebagai pusat kegiatan penguatan kapasitas guru
3. Penerapan masa jabatan Kepala Sekolah menurut periode sebagai upaya peningkatan kinerja
4. Redistribusi pendidik dan tenaga kependidikan

5. Pemberian penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
 - a. Mengupayakan pembahasan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupaya diversifikasi kurikulum yang berlaku daerah sesuai dengan kepentingan setempat.
 - b. Memberdayakan lembaga pendidikan baik dalam sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi.
 - d. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat serta minat yang dimiliki.
 - e. Mengembangkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul serta mandiri.
 - f. Melindungi segenap muda dari bahaya penyalahgunaan psikotropika, obat-obatan terlarang lainnya melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
 - g. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia sehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat.
 - h. Mengupayakan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing-masing organisasi olahraga.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Banda Aceh adalah ***“Menjadi Pengelola Pendidikan Yang Berkualitas, Bermartabat dan Islami”*** Sementara itu sesuai dengan misi Walikota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan capaian-capaian terakhir penyediaan layanan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Misi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Banda Aceh adalah:

1. Melaksanakan pendidikan yang merata, dan terbebas dari hambatan biaya
2. Meningkatkan pengelolaan lembaga pendidikan yang profesional
3. Melaksanakan program diniyah pada setiap jenjang pendidikan
4. Menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa pada peserta didik
5. Menerapkan Manajemen Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK) dalam akses pendidikan dan pembelajaran (e-education)
6. Melakukan pembinaan bagi pemuda dan cabang Olahraga untuk meujudkan insan yang sehat, sigap dan terampil.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan :

1. Pemenuhan biaya operasional sekolah secara bertahap dan berkeadilan pada setiap satuan Pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas aparatur yang profesional, bersih, cerdas dan bebas dari KKN

3. Terlaksananya pembelajaran diakhir pada sore hari minimal 4 jam perminggu pada setiap satuan pendidikan
4. Meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap nilai-nilai budaya bangsa
5. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan yang profesional dan berbasis teknologi.
6. Meningkatkan peran serta Pemuda dalam pembangunan sektor Pendidikan.
7. Menjadikan Masyarakatan mencintai dan gemar Olahraga.

Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Banda Aceh sesuai dengan Visi dan Misinya adalah mencakup:

1. Meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif sehingga peserta didik memiliki ilmu pengetahuan,cerdas,terampil dan beraakhlak mulia.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan sesuai pada bidangnya.
3. Lulusan yang punya daya saing, terampil dan berakhlak mulia sebagai insan yang mencintai bangsa dan Tanah Air.
4. Pendidik (guru) tenaga kependidikan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi Informasi.
5. Keterlibatan peran serta kepemudaan dan masyarakatan Olahraga dalam penyelenggaraan pendidikan disemua jenjang berdasarkan prinsip otonomi pendidikan dan otonomi sekolah yang dilaksanakan melalui komite sekolah dan forum musrenbang.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam Rencana Pembangunan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 bertujuan untuk *mewujudkan Pendidikan yang Bermutu dan berakhlak Mulia*. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan Pembangunan dibidang Pendidikan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan yang dilihat dari segi internal dan eksternal.

Analisis SWOT

Internal	Eksternal
Kekuatan (Strengths) <ol style="list-style-type: none">1. Adanya sumber daya manusia dengan susunan kepegawaian yang baik2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai3. Tingginya komitmen Dinas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan4. Adanya kerharmonisan antar bidang5. Terciptanya kedisiplinan pegawai	Peluang (Opportunity) <ol style="list-style-type: none">1. Adanya dukungan masyarakat untuk memajukan dunia pendidikan di Aceh2. Adanya kerjasama dari berbagai lembaga/instansi lain3. Adanya dukungan program dari pemerintah atasan4. Sikap Masyarakat yang membuka diri bahwa pendidikan itu penting5. Adanya dukungan dari pihak/ instansi lain
Kelemahan (Weakness) <ol style="list-style-type: none">1. Kualitas SDM belum optimal2. Lemahnya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi antar bidang3. Kurangnya sosialisasi program pendidikan4. Kondisi sarana dan prasarana kurang memadai5. Tidak tersedianya data yang lengkap dan akurat	Ancaman (Threats) <ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya mutu pendidikan2. Kurangnya minat baca3. Daerah rawan bencana/konflik4. Rendahnya daya saing5. Adanya paham aliran sesat/Pendangkalan aqidah

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program prioritas Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Banda Aceh diterjemahkan menjadi 13 program dan 65 kegiatan. Disajikan pula pencapaian target indikator kerja pada tahun 2017 yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kerja pada tahun 2012.

Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah daerah untuk membiayai belanja pendidikan, maka strategi pembiayaan pendidikan Kota Banda Aceh dalam lima tahun ke depan disusun secara komprehensif sebagai representasi aspirasi dan kebutuhan Masyarakat (warga kota) yang disepakati bersama baik oleh masyarakat, stakeholder, maupun Pemerintah dan DPRK Banda Aceh sebagai kelanjutan dari pelaksanaan rehab/rekon dalam skala prioritas, bertahap dan berkesinambungan. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan didasarkan pada: a) keberpihakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi lemah yang perlu perhatian dari pemerintah daerah, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; b) tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan, pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur formal maupun non-formal, serta untuk menjawab komitmen dan kepentingan nasional; dan c) prediksi perkembangan kemampuan keuangan daerah dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan di Kota Banda Aceh. Adapun Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh seperti yang terlihat pada (Tabel 5.1) didasarkan pada beberapa program kegiatan yang dapat dijabarkan dengan capaian kinerja untuk

indikator kinerja, sasaran yang dicapai dan pendanaan pada masing masing kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah ;

- 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan hasil berupa berfungsinya sarana komunikasi, sumber daya air dan Listrik selama 12 bulan dari target yang diharapkan sebesar 12 bulan, anggaran sejumlah Rp. 2.078.794.000,-
- 1.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan hasil berupa meningkatnya jasa kebersihan Kantor selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan jumlah anggaran sebanyak Rp. 38.250.000,-
- 1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan hasil berupa lancarnya kegiatan rutin kantor selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan, anggaran sejumlah Rp. 67.000.000,-
- 1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan hasil berupa Lancarnya administrasi perkantoran selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan anggaran sejumlah Rp. 52.000.000,-
- 1.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dengan hasil berupa Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan anggaran sejumlah Rp. 30.000.000,-
- 1.6 Penyediaan Makanan dan Minuman dengan hasil berupa Terpenuhinya makan siang Pegawai/peserta rapat dan Tamu Dinas selama 11 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan, anggaran sejumlah Rp 429.702.000.-

- 1.7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan hasil berupa Lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan Anggaran sejumlah Rp. 78.000.000,-
- 1.8 Penyediaan Jasa Pelelangan/ Pengadaan Barang dengan hasil meningkatnya pelelangan barang dan jasa selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan anggaran sejumlah Rp. 6.750.000,-
- 1.9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ teknis perkantoran dengan hasil berupa Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan, anggaran sejumlah Rp.1.623.900.000,-
- 1.10 Penyediaan/ Peningkatan Pelayanan Pendidikan dengan hasil berupa Lancarnya layanan pendidikan selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan anggaran sejumlah Rp 733.950.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :

- 2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan hasil berupa berfungsinya perlengkapan kantor Disdikpora dan UPTD selama 12 Bulan dengan anggaran sejumlah Rp. 1.434.887.300,-
- 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan hasil berupa Berfungsinya Gedung Pemuda dan Tekkomdik selama 12 bulan dengan anggaran sejumlah Rp.1.556.450.175,-
- 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan kantor dengan hasil berupa Berfungsinya peralatan peralatan kantor selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan anggaran sejumlah Rp. 89.664.000,-

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan hasil berupa Berfungsinya peralatan peralatan kantor selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan anggaran sejumlah Rp. 15.450.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dengan hasil berupa meningkatnya Keseragaman pakaian pegawai dinas sebanyak 3782 orang dengan anggaran sejumlah Rp.1.512.800.000,-

3.2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu dengan hasil berupa meningkatnya Keseragaman pakaian pegawai dinas khusus hari-hari tertentu sebanyak 3782 orang dengan anggaran sejumlah Rp. 756.400.000,-

4. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan yang merupakan Penjabaran dari program ini adalah :

4.1 Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dinidengan hasil yang diharapkan terlatihnya pendidik TK yang amampu menangani anak usia 4 s/d 6 tahun dengan jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 23.849.507,-

4.2 Pengembangan kratifitas melalui lomba anak usia dini dengan hasil yang diharapkan promosi pengembangan PAUD untuk peningkatan APK PAUD dengan Anggaran Rp. 20.996.191,-

4.3 Pentelenggaraan seleksi olahraga anak usia dini antar gugus dengan hasil meningkatnya kompetensi pendidik PAUD dengan target capaian 30 Orang dan anggaran Rp. 18.971.566,-

4.4 Penyediaan Bantuan Operasional TK merupakan persentase BOP TK meningkat sebanyak 3 TK negeri dengan jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 130.175.000,-

5. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

5.1 Pengadaan alat peraktek dan peraga merupakan peningkatan kemampuan siswa dalam IT dengan target 3 SD dan 4 SMP dengan anggaran Rp. 1.794.721.566,-

5.2 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Berstandar Internasional meningkatnya jumlah sekolah yang berstandar internasional sebanyak 587 Rombel dengan anggaran sejumlah Rp. 4.541.332.500,-

5.3 Pemberian Beasiswa Siswa/ Santri jenjang SD/SMP sebanyak 400 siswa dari target yang diharapkan sebanyak 400 orang, anggaran sejumlah Rp.621.950.000,-

5.4 Penyelenggaraan Ujian Akhir sekolah berstandar nasional SD dan Ujian nasional SMP sederajat, dengan jumlah 4256 siswa dan anggaran yang diberikan sebesar Rp. 101.070.000,-

5.5 Penyelenggaraan sekolah Inklusi dengan tujuan terampilnya Guru inklusi disekolah yang ditunjuksebanyak 235 Guru dengan jumlah anggaran Rp. 31.685.500,-

5.6 Penyediaan dana penunjang pendidikan jenjang SD/SMP Negeri dengan hasil berupa jumlah siswa yang mendapatkan dana penunjang pendidikan sebanyak 23751 siswa dengan anggaran sejumlah Rp 2.743.260.000,-

5.7 Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan hasil meningkatnya jumlah ruang kelas yang sudah direhab memenuhi SPM dari target 100% dengan anggaran Rp 7.137.218.000,-

6 Program Pendidikan Menengah

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- 6.1 Penyediaan alat peraktek/ peraga siswa diharapkan mampu terpenuhinya sekolah yang mendapatkan lata peraga/peraktek SMA/SMK dengan jumlah anggaran 1.702.338.200,-
- 6.2 Pemeliharaan rutin / berkala bangunan sekolah dengan hasil berupa meningkatnya pemanfaatan Teknologi pada SMA/SMK dengan anggaran sejumlah Rp.2.816.461.600,-
- 6.3 Pemberian Beasiswa Bagi siswa dari Keluarga Tidak mampu dengan hasil diharapkan menurunnya angka putus sekolah pada SMA/SMK sebanyak 500 orang dengan anggaran sejumlah Rp.601.275.000,-
- 6.4 Penerimaan Siswa Baru dengan hasil yang diharapkan meningkatnya daya tampung siswa di setiap jenjang satuan pendidikan sebanyak 9001 siswa dari target yang diharapkan 9001 siswa anggaran sejumlah Rp. 105.831.000,-
- 6.5 Penyertaan Penyelenggaraan lomba Keterampilan Siswa (LKS), dengan hasil yang diharapkan meningkatnya jumlah siswa yang mengikuti lomba keterampilan siswa pada tingkat nasional sebanyak 14 orang dengan anggaran sejumlah Rp.288.800.000,-
- 6.6 Penyediaan Tambahan Pembiayaan Operasional Sekolah jenjang SMA/SMK Negeri dengan hasil yang diharapkan meningkatnya angka partisipasi sekolah (APK) sebanyak 10479 siswa dengan anggaran sejumlah Rp. 6.410.650.000,-
- 6.7 Penyelenggaraan seleksi paskibraka tingkat Kota dengan hasil yang diharapkan terlaksananya seleksi paskibraka nasional yang menghasilka 2

orang peserta dengan anggaran sebesar Rp. 34.460.000,-

- 6.8 Penyelenggaraan pelatihan pengembangan ketaqwaan dan keimanan tingkat SMA sederajat dengan tujuan tercapainya kemampuan baca al-qur'an, pemahaman dan pengamalan Agama Islam pada 398 rombel dengan anggaran sebesar Rp. 2.530.788.700,-
- 6.9 Monitoring dan Evaluasi Ujian Paket A,B dan C, dengan hasil yang diharapkan Terlaksananya ujian paket A,B dan C sebanyak 583 siswa dengan anggaran sejumlah Rp.51.862.750,-
- 6.10 Penyertaan Kegiatan Exhibishi/gelar Prestasi Siswa SMK Tingkat Nasional dengan hasil yang diharapkan meningkatnya jumlah siswa SMK yang berprestasi sebanyak 40 siswa dengan anggaran sejumlah Rp. 32.550.000,-
- 6.11 Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA/SMK dan MA dengan hasil yang diharapkan meningkatnya angka kelulusan pada jenjang SMA/SMK dan MA sebanyak 5464 siswa dengan anggaran sejumlah Rp.160.910.000,-
- 6.12 Olimpiade Sains SMA/SMK sederajat dengan hasil meningkat partisipasi siswa SMA/ SMK yang mengikuti O2SN sebanyak 816 siswa dengan anggaran Rp. 58.410.600,-

7 Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- 7.1 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Antar Pelajar dengan hasil yang diharapkan tersediannya atlit –atlit potensial di 4 cabang olahraga sebanyak 164 Atlit dengan anggaran sejumlah Rp.153.882.500,-
- 7.2 Pembinaan Club Olahraga Pelajar dengan hasil meningkatnya Atlit yang

berprestasi ditingkat Provinsi sebanyak 94 Atlit dengan anggaran Rp 253.285.500,-

7.3 Penyertaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dengan hasil yang diharapkan meningkatnya prestasi atlit dari peringkat 5 keperingkat 1 dan Anggaran Rp. 0,-

8. Program Pendidikan Luar Biasa

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

8.1 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dengan hasil yang diharapkan terlaksananya pendidik tuna runngu dan tuna wicara meningkat sebanyak 50 Orang dengan anggaran Rp. 17.988.000,-

9. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

9.1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik hasil yang diharapkan presentase guru, kepek dan pengawas yang sudah tersertifikasi sebanyak 1650 orang dengan jumlah anggaran Rp. 11.900.000,-

9.2 Peningkatan kelompok kerja Guru (KKG) dengan diharapkan terampilnya guru dalam pelaksanaan Proses kegiatan Belajar (PKB) sebanyak 13 KK dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp. 180.803.700,-

9.3 Penyelenggaraan tehnis penyusunan angka kredit fungsional guru dengan hasil persentase guru, kepala sekolah dan pengawas dapat naik pangkat tepat waktu.anggaran yang disediakan Rp. 26.190.000,-

9.4 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (MGMP) jenjang pendidikan Menengah hasil yang diharapkan terlaksananya pembelajaran disekolah menggunakan

- kurikulum 2013 dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp. 69.030.000,-
- 9.5 Pelatihan Manajemen kepala sekolah sebanyak 60 Orang dengan anggaran Rp. 76.230.000,-
- 9.6 Pelaksanaan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Teladan dengan hasil yang diharapkan tersedianya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi pada Tingkat Nasional sebanyak 65 orang dengan anggaran sejumlah Rp.156.950.000,-
- 9.7 Pemberian penghargaan terhadap guru beprestasi ditingkat Nasional dengan Anggaran Rp. 15.000.000,-
- 9.8 Penanaman karakter (Budi pekerti) dengan hasil meningkatnya pemahaman karakter bangsa bagi guru target 480 Orang dengan anggaran yang tersedia Rp. 303.466.000,-
- 9.9 Meningkatkan fungsi pengawasan sekolah dengan capaian meningkatnya fungsi pengawas sekolah dalam membina sekolah dengan anggaran yang tersedia Rp. 105.100.000,-

10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- 10.1 Penerbitan buku data dan informasi pendidikan dengan hasil yang diharapkan meningkatnya informasi dan layanan bidang pendidikan sebanyak 3 jenis buku dengan anggaran sejumlah Rp. 36.102.000,-
- 10.2 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen dan pembelajaran berbasis Teknologi dengan hasil meningkatnya kemampuan siswa yang menguasai pembelajaran berbasis Teknologi sebanyak 12 Bulan dengan anggaran Rp 416.925.000,-
- 10.3 Penerapan sistem jaringan pendidikan berbasis teknologi dengan hasil

meningkatnya kompetensi dalam pemanfaatan TIK.anggaran tersedia sebesar Rp. 485.900.000,-

11. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- 11.1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan hasil yang diharapkan meningkatnya jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina sebanyak 67 OKP dengan anggaran sejumlah Rp.307.850.000,-
- 11.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dengan hasil yang diharapkan meningkatnya pengetahuan kepemimpinan organisasi kepemudaan (OKP) sebanyak 100 orang dengan anggaran Rp. 124.300.000,-
- 11.3 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda dengan hasil meningkatnya pemahaman penyalahgunaan narkoba pada generasi muda dengan anggaran Rp. 84.300.000,-
- 11.4 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan dengan anggaran Rp. 0,-
- 11.5 Pembinaan Pemuda Bela Negara dengan hasil yang diharapkan meningkatnya semangat bela Negara dikalangan pemuda,anggaran yang tersedia Rp. 17.575.000,-
- 11.6 Pelatihan KMD/KML bagi pemuda gudup pramuka diharapkan mampu terbinanya intstruktur/pelatih gugus depan pramuka.anggaran tersedia Rp. 102.225.000,-

12. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- 12.1 Pelatihan keterampilan bagi pemuda dengan hasil yang diharapkan meningkatnya kompetensi tehni alat-alat listrik bagi pemuda sebanyak 20 orang dengan anggaran Rp. 56.859.000,-

13. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- 13.1 Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat dengan hasil yang diharapkan terbinanya kembali 6 cabang olahraga tradisional yang berkembang dikalangan masyarakat.anggaran yang tersedia sebesar Rp. 739.184.000,-
- 13.2 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) dengan hasil yang diharapkan tersedianya pemain untuk mengikuti sepakbola LPI Tk.Prov. Aceh dengan anggaran yang tersedia Rp. 242.199.000,-
- 13.3 Seleksi Olahraga Usia Dini antar Gugus SD dengan hasil yang diharapkan terpilihnya Club usia dini 4 cabang dengan anggaran Rp. 85.686.000,-
- 13.4 Seleksi dan Keikutsertaan pada Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) SD/SMP/SMA/SMK sederajat dengan hasil meningkatnya prestasi siswa dalam mengikuti O2SN.anggaran yang tersedia Rp. 392.720.000,-
- 13.5 Seleksi dan Keikutsertaan pada Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dengan hasil yang diharapkan meningkatnya siswa yang mengikuti FLS2N di Tk.Prov. Aceh 7 cabang seni. Dengan anggaran Rp. 87.480.000,-

14. Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

- 12.1 Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan hari Aksara dengan hasil yang diharapkan meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti HAI sebanyak 1 Event dengan anggaran sebesar Rp. 24.085.000,-

BAB VI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi pengelola dan penyelenggara pendidikan yang mencakup aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program pendidikan tersebut. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah (2012-2017), dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat diukur secara obyektif serta fleksibel terhadap perubahan/penyesuaian.

Mengingat bidang pendidikan mempunyai program pembangunan pendidikan yang beragam, maka indikator kinerja yang diukur dapat bersifat fisik (misalnya: pembangunan prasarana dan sarana fisik, angka partisipasi siswa, angka mengulang kelas, dan angka putus sekolah) maupun nonfisik, misalnya, peningkatan nilai UN, serta kecerdasan dan perilaku peserta didik. Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis indikator kinerja maka diperlukan cara dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan sifat dan bentuk indikator yang akan diukur.

Program dan/atau kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, timebound*). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program. Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau pengukuran kinerja organisasi, yaitu:

1. **Indikator masukan**, antara lain mencakup kurikulum, siswa, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, pendidik dan tenaga kependidikan, gedung sekolah, kelompok belajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan anak (fisik dan mental) dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
2. **Indikator proses**, antara lain mencakup lama waktu belajar, kesempatan mengikuti pembelajaran, lama mengikuti pendidikan, jumlah yang putus sekolah, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan.
3. **Indikator keluaran**, antara lain mencakup jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai-rata-rata ujian, mutu yang naik kelas, dan jumlah siswa yang menyelesaikan pembelajaran/naik kelas berdasarkan jenis kelamin.
4. **Indikator dampak**, yang antara lain berupa kemampuan/jumlah siswa yang melanjutkan sekolah, jumlah siswa yang bisa bekerja di perusahaan atau usaha mandiri, jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, dan pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja/lingkungan sosial, peran serta siswa dalam pembangunan lingkungan dan pengaruh atau peran lulusan pendidikan dan pelatihan terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Indikator kinerja yang diukur dalam pemantauan dan evaluasi meliputi tiga tema kebijakan nasional pendidikan, yang selanjutnya diklasifikasi dalam dua aspek. Dua aspek tersebut yaitu: Aspek kesejahteraan Masyarakat yang meliputi kesejahteraan social pendidikan dan Aspek Pelayanan Umum yang didukung oleh pelayanan urusan wajib pendidikan baik dasar maupun menengah. Dari dua aspek tersebut diuraikan menjadi indikator kunci/prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Renstra Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh 2012-2017 (Tabel 6.1).

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Pada
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kota Banda Aceh

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Thn 2012	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan Sosial							
	Pendidikan							
	Angka melek huruf	99,06%	99,20	99,30	99,40	99,60	99,80	100%
	Angka rata-rata lama sekolah	6,14	6,10	6,08	6,06	6,04	6,02	6,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	114,99	114,99	114,99	114,99	114,99	114,99	95%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	84,29	84,35	84,40	84,60	84,80	90	90%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	72,17	74,30	76,80	78,90	80,20	83,90	85%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	100%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	100%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	100%
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) SD	100	100	100	100	100	100	100%
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) SMP	99,40	99,60	99,70	99,80	99,10	100	100%
	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT) SMA	99.63	99,70	99,75	99.8	99.9	100	100%
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Pendidikan							
	Pendidikan Dasar							
	Angka partisipasi sekolah							
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	117,77	100%
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SD/MI	206	206	206	206	206	206	100%
	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTs	292	292	292	292	292	292	100%
	Rasio terhadap murid							
	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI)	19	20	22	24	26	28	28 (100%)
	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	12	13	14	15	16	17	18 (100%)
	Pendidikan menengah							
	Angka partisipasi sekolah	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	107,65	100%
	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	75 grup	0	0	0	0	0	75 grup
	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0	0	0	1gedung	1 gedung	1 gedung	3 gedung
	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	46 klub	0	0	0	0	0	46 klub
	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	1 gedung	0	0	1 Gedung	0	1 Gedung	3 Gedung
	Majelis Pendidikan Daerah							
	Monitoring dan Evaluasi Mutu Pendidikan terhadap SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK	129 Org	136 Org	140 Org	147 Org	155 Org	162 Org	
	Sosialisasi Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK	3 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	
	Pemberdayaan Komite Sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK	129 Org	136 Org	140 Org	147 Org	155 Org	162 Org	
	Sosialisasi konsep pendidikan Islami untuk	3 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017		
		1	2	3	4	5	6		7
	SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK								
	Memberi pertimbangan kepada kepala daerah dan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga terhadap mutu pendidikan SD/MI.	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	4 sekolah	
	Menampung aspirasi masyarakat (sekolah) serta peran Mediasi (sekolah)	20 sekolah	15 sekolah	12 sekolah	10 sekolah	10 sekolah	10 sekolah	10 sekolah	

Indikator Kinerja pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran Pendidikan dan tingkat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja dibidang pendidikan. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pendidikan ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pendidikan
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pendidikan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pendidikan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan yang baik.

BAB VII

PENUTUP

Selanjutnya RENSTRA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kota Banda Aceh Tahun 2012 merupakan bagian dari RPJMD Kota Banda Aceh 2012 s.d. 2017. Oleh karena itu, renstra ini dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan daerah di bidang pendidikan, berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh.

RENSTRA-SKPD Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. dikembangkan berdasarkan lima strategi dan kebijakan dasar. Kelima strategi dan kebijakan dimaksud adalah (a) akses dan pemerataan; (b) mutu; (c) daya saing; (d) tata kelola; (e) partisipasi masyarakat;. Dari keenam strategi tersebut telah dirumuskan sejumlah program, baik yang terkait dengan aspek fisik maupun nonfisik dan program-program tersebut diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. dalam kurun waktu 2012 s.d. 2017 bersifat holistik dan integratif. Artinya, pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek dengan aspek pembangunan lainnya, baik fisik maupun nonfisik dilakukan secara terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan akan

dimanfaatkan atau akan berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat. Selain itu, semua pihak cukup menyadari bahwa pembangunan pendidikan itu sendiri merupakan aspek pembangunan bangsa terpenting dalam menyiapkan "*Insan cerdas dan kompetitif yang dilandasi nilai-nilai islami*" dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk percepatan aspek pembangunan lainnya.

Demikian RENSTRA-SKPD Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan. Mudah-mudahan RENSTRA-SKPD ini dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Banda Aceh tahun 2012 - 2017.

Tabel 5.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
KOTA BANDA ACEH 2012 – 2017

Tujuan	sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian kinerja pada Awal Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab				
							2013		2014		2015		2016		2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
							Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur secara optimal.	Meningkatkan sumber daya aparatur yang professional dan kompeten		1																			
			01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	95.62%	100%	5,138,346,000	100%	5,652,180,600	100%	5,630,595,240	100%	5,914,224,564	100%	6,226,216,820	100%	28,561,563,224				
			01 02	- Penyediaan suber daya air dan listrik	Berfungsinya sarana komunikasi, SDA dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	2,078,794,000	12 Bulan	2,286,673,400	12 Bulan	2,515,340,740	12 Bulan	2,766,874,814	12 Bulan	3,043,562,295	12 Bulan	12,691,245,249				
			01 08	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	38,250,000	12 Bulan	42,075,000	12 Bulan	46,282,500	12 Bulan	50,910,750	12 Bulan	56,001,825	12 Bulan	233,520,075				
			01 10	- Penyediaan ATK	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	67,000,000	12 Bulan	73,700,000	12 Bulan	81,070,000	12 Bulan	89,177,000	12 Bulan	98,094,700	12 Bulan	409,041,700				
			01 11	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan bahan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	52,000,000	12 Bulan	57,200,000	12 Bulan	62,920,000	12 Bulan	69,212,000	12 Bulan	76,133,200	12 Bulan	317,465,200				
			01 12	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	33,000,000	12 Bulan	36,300,000	12 Bulan	39,930,000	12 Bulan	43,923,000	12 Bulan	183,153,000				
			01 17	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai, peserta rapat dan tamu kadis	11 Bulan	11 Bulan	429,702,000	11 Bulan	472,672,200	11 Bulan	429,702,000	11 Bulan	429,702,000	11 Bulan	429,702,000	11 Bulan	2,191,480,200				
			01 18	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	78,000,000	12 Bulan	85,800,000	12 Bulan	94,380,000	12 Bulan	103,818,000	12 Bulan	114,199,800	12 Bulan	476,197,800				
			01 19	- Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	Tersedianya jasa pelelangan dan pengadaan barang dan jasa	6 Bulan	6 Bulan	6,750,000	6 Bulan	7,425,000	6 Bulan	6,750,000	6 Bulan	6,750,000	6 Bulan	6,750,000	12 Bulan	34,425,000				
			01 20	- Penyediaan jasa Tenaga Pendukung ADM Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1,623,900,000	12 Bulan	1,786,290,000	12 Bulan	1,623,900,000	12 Bulan	1,623,900,000	12 Bulan	1,623,900,000	12 Bulan	8,281,890,000				
			01 21	- Penyediaan/ Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Tersedianya jasa pelayanan pendidikan	12 Bulan	12 Bulan	733,950,000	12 Bulan	807,345,000	12 Bulan	733,950,000	12 Bulan	733,950,000	12 Bulan	733,950,000	12 Bulan	3,743,145,000				
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	94.08%	100%	3,096,451,475	100%	906,096,623	100%	996,706,285	100%	1,556,635,113	100%	1,825,242,041	100%	8,381,131,537				
			02 22	- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	terpenuhinya perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,434,887,300	12 Bulan	578,376,030	12 Bulan	636,213,633	12 Bulan	1,129,093,195	12 Bulan	1,254,547,994	12 Bulan	5,033,118,152				
			02 24	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor Disdikpora dan UPTD	12 Bulan	12 Bulan	1,556,450,175	12 Bulan	212,095,193	12 Bulan	233,304,712	12 Bulan	256,635,184	12 Bulan	282,298,702	12 Bulan	2,540,783,966				
02 28	- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kenderaaan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	89,664,000	12 Bulan	98,630,400	12 Bulan	108,493,440	12 Bulan	150,342,784	12 Bulan	265,775,000	12 Bulan	712,905,624							
02 28	- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	12 Bulan	15,450,000	12 Bulan	16,995,000	12 Bulan	18,694,500	12 Bulan	20,563,950	12 Bulan	22,620,345	12 Bulan	94,323,795							
Meningkatnya mutu pendidikan secara komprehensif			15	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	100%	100%	2,269,200,000	100%	1,664,080,000	100%	1,512,800,000	100%	1,701,900,000	100%	1,701,900,000	100%	8,849,880,000				
				- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersediannya pakaian dinas		3782 Orang	1,512,800,000	3845 Orang	1,664,080,000	3845 Orang	1,512,800,000	3845 Orang	1,701,900,000	3845 Orang	1,701,900,000	18910 stel	8,093,480,000				
				- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersediannya pakaian muslim	2465 stel	3782 Orang	756,400,000									3782 orang	756,400,000				
15 1 1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya angka partisipasi kasar TK	84.14%	88.85%	193,992,264	89.60%	393,192,500	91.39%	428,192,500	97.22%	464,692,500	99.08%	1,014,792,500	100%	2,494,862,264							
15 62	- Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan Model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik TK	-	50 orang	23,849,507	56 orang	180,000,000	57 orang	200,000,000	56 orang	220,000,000	57 orang	542,000,000	787 orang	1,165,849,507							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
(merata) sehingga peserta didik memiliki ilmu pengetahuan ,cerdas,terampil dan beahlak mulia		-Meningkatnya jumlah masyarakat yang melek huruf	15 69	- Pengembangan Kreatifitas Melalui Lomba Anak usia Dini	Terselenggaranya Kreatifitas PAUD 1 Event	-	1500 Anak	20,996,191	1641 Anak	100,000,000	1642 Anak	110,000,000	1642 Anak	121,000,000	1642 Anak	333,100,000	8067 Orang	685,096,191	DISDIKPOR	
		-Meningkatnya jumlah murid pendidikan Anak Usia Dini	15 70	- Penyelenggaraan seleksi olahraga Anak Usia Dini Antar Gugus	Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD	-	30 orang	18,971,566	73 orang	50,000,000	74 orang	55,000,000	73 orang	60,500,000	75 orang	76,500,000	325 orang	260,971,566		
Terlaksananya program pendidikan Diniyah pada sore hari pada setiap satuan pendidikan minimal 4 jam perminggu			15 72	Penyediaan Bantuan Operasional TK	Tersedianya biaya Operasional TK Negeri	3 TK Negeri	3 TK Negeri	130,175,000	4 TK Negeri	63,192,500	4 TK Negeri	63,192,500	5 TK Negeri	63,192,500	9 TK Negeri	63,192,500	9 TK Negeri	382,945,000	DISDIKPOR	
			16 1 2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-Tuntasnya Wajib Belajar Sembilan Tahun yg bermutu dan Islami	81.97%	84.50%	16,971,237,566	87.11%	18,268,361,322	89.81%	19,305,067,242	92.59%	20,400,543,969	95.59%	21,563,816,868	100%	96,509,026,967		
					- Jumlah Sekolah SD/SMP yg melaksanakan Program Diniyah	- 205 rombel														
			16 18	Pengadaan Alat Peraktek dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah yang mendapatkan alat praktek IT	67 Sekolah	7 Sekolah	1,794,721,566	26 Sekolah	1,574,193,722	28 Sekolah	1,729,613,094	29 Sekolah	1,902,574,403	31 Sekolah	2,092,831,844	121 Sekolah	9,093,934,629		
			16 66	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTs	Jumlah sekolah yang melaksanakan program Diniyah 71 SDN (291 rombel), 19 SMPN (296 rombel)	406 rombel	587 rombel	4,541,332,500	587 rombel	4,995,465,750	587 rombel	5,245,239,038	587 rombel	5,507,500,989	587 rombel	5,782,876,039	2935 rombel	26,072,414,316		
			16 91	Pemberian Beasiswa Siswa/santri	Tersedianya beasiswa SD/SMP bagi siswa miskin	2000 Siswa	400 Siswa	621,950,000	4927 siswa	684,145,000	4930 siswa	752,559,500	4935 siswa	827,815,450	4940 siswa	910,596,995	20132 Siswa	3,797,066,945		
			16 94	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Berstandar Nasional (USBN) SD/MI dan SMP/MTs Sederajat	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional Bagi Siswa SD/MI, SMP/MTS	21280 Siswa	4256 Siswa	101,070,000	4518 Siswa	111,177,000	4520 Siswa	122,294,700	4524 Siswa	134,524,170	4526 Siswa	147,976,587	22344 Siswa	617,042,457		
			16 95	Penyelenggaraan sekolah inklusi	Terlathinya Guru Sekolah inklusi	180 Guru	235 Guru	31,685,500	235 Guru	34,854,050	235 Guru	36,596,753	235 Guru	38,426,590	235 Guru	40,347,920	1175 Guru	181,910,812		
			16 96	Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	Sekolah yang mendapat bantuan DAK	67 Sekolah	31 Sekolah	7,137,218,000	22 Sekolah	7,850,939,800	23 Sekolah	8,243,486,790	22 Sekolah	8,655,661,130	23 Sekolah	9,088,444,186	121 Sekolah	40,975,749,905		
			16 97	Penyediaan dana penunjang pendidikan	Jumlah siswa yang tersedianya dana penunjang pendidikan	28835 Siswa	23.751 Siswa	2,743,260,000	24811 Siswa	3,017,586,000	26117 Siswa	3,175,277,368	27492 Siswa	3,334,041,236	28939 Siswa	3,500,743,298	118755 Siswa	15,770,907,903		
Pemenuhan biaya Operasional sekolah secara bertahap dan berkeadilan			17 1 3	Program pendidikan menengah	- Lulusan Sekolah Menengah yang bermutu dan islami	98%	100%	14,794,337,850	100%	16,273,771,635	100%	17,099,522,850	100%	17,984,446,089	100%	19,195,343,470	100%	85,347,421,893	DISDIKPOR	
					- Jumlah Sekolah SMA/K yg melaksanakan Program Diniyah	- 258 rombel														
			17 18	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	Jumlah sekolah diadakan alat peraga siswa	8 Sekolah	15 Sekolah	1,702,338,200	5 Sekolah	1,872,572,020	5 Sekolah	1,966,200,621	5 Sekolah	2,064,510,652	5 Sekolah	2,167,736,185	35 Sekolah	9,773,357,678		
				Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah ruang kelas yang telah direhab	15 Sekolah	15 Sekolah	2,816,461,600	5 Sekolah	3,098,107,760	5 Sekolah	3,253,013,148	5 Sekolah	3,415,663,805	5 Sekolah	3,586,446,996	35 Sekolah	16,169,693,309		
			17 62	Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu	tersedianya beasiswa keluarga tidak mampu	4499 Siswa	500 Siswa	601,275,000	250 Siswa	661,402,500	250 Siswa	694,472,625	250 Siswa	729,196,256	250 Siswa	765,656,069	1500 Siswa	3,452,002,450		
	17 71	Penerimaan Siswa Baru	Jumlah penerimaan siswa baru pada SMP/MTS/SMA/MA/SMK	45005 siswa	9001 Siswa	105,831,000	9001 Siswa	116,414,100	9001 Siswa	122,234,805	9001 Siswa	128,346,545	9001 Siswa	134,763,873	45005 Siswa	607,590,323				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan sektor pendidikan	Keterlibatan peran serta kepemudaan dan pemasyarakatan olahraga dalam penyelenggaraan pendidikan disemua jenjang berdasarkan prinsip otonomi pendidikan dan otonomi sekolah yang dilaksanakan melalui Komite	- Ketersediaan Data Pendidikan yang lengkap	Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah	Jumlah kepala SMP/SMA/K yang dilatih manajemen	162 Orang	60 Orang	76,230,000	60 Orang	83,853,000	60 Orang	92,238,300	60 Orang	101,462,130	60 Orang	111,608,343	162 Orang	465,391,773				
			Pelaksanaan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Teladan	Terselenggaranya uji kompetensi guru, kepek dan pengawas berdedikasi	1645 Orang	65 Orang	156,950,000	72 Orang	172,645,000	80 Orang	189,909,500	89 Orang	208,900,450	99 Orang	229,790,495	1645 Orang	958,195,445				
			Pemberian Penghargaan terhadap guru berprestasi tingkat nasional	Guru, kepek dan pengawas yang berpredikat guru berprestasi	115 Orang	3 Orang	15,000,000	3 Orang	16,500,000	3 Orang	18,150,000	3 Orang	19,965,000	3 Orang	30,961,000	115 Orang	100,576,000				
			Pemantapan karakter (budi pekerti)	Jumlah guru yang ikut pelatihan karakter bangsa	3676 Orang	480 Orang	303,466,000	755 Orang	333,812,600	780 Orang	367,193,860	861 Orang	403,913,246	950 Orang	644,578,000	3676 Orang	2,052,963,706				
			Peningkatan fungsi pengawas sekolah	Jumlah pengawas yang melaksanakan pembinaan disekolah	29 Orang	29 Orang	105,100,000	49 Orang	115,610,000	49 Orang	127,171,000	80 Orang	726,948,016	80 Orang	799,642,818	80 Orang	1,874,471,834				
				22 2	Program manajemen pelayanan pendidikan	3.359 tenaga pendidik mengikuti diklat kompetensi sesuai bidangnya	480 orang	75.57%	2,148,927,600	79.54%	3,035,969,228	83.73%	3,478,666,946	88.14%	4,535,787,777	92.78%	5,273,611,896	92.78%	18,472,963,446		
				22 11	- Penerbitan buku data dan informasi pendidikan	Jumlah Buku Data Pendidikan	15 jenis buku	3 Jenis	36,102,600	3 Jenis	39,712,860	3 Jenis	43,684,146	3 Jenis	48,052,561	3 Jenis	52,857,817	15 Jenis Buku	220,409,983		
				22 14	- Penerapan Sestim & Inf. Manajemen & Pembelajaran Berbasis Teknologi	Jumlah pelatihan TIK	16	13 Kali	416,925,000	13 kali	458,617,500	16 kali	504,479,250	18 kali	554,927,175	20 kali	610,419,893	80 Kali	2,545,368,818		DISDIKPORA
				22 15	- Kegiatan Penerapan Sistem Jaringan Pendidikan Berbasis Teknologi	Efektifitas system TIK	12 Bulan	12 Bulan	485,900,000	12 Bulan	534,490,000	12 Bulan	587,939,000	12 Bulan	646,732,900	12 Bulan	711,406,190	60 Bulan	2,966,468,090		
					Penerapan sistem Jaringan BAICC Pendidikan	Jaringan interkoneksi antar sekolah jenjang SMP dan SMA/K		-	-	6 Sekolah dan Dinas	732,648,868	10 Sekolah	1,008,539,550	12 Sekolah	1,885,348,891	12 Sekolah	2,428,165,434	39 Sekolah	6,054,702,743		
				22 16	Penyediaan Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah	Layanan jasa dan produksi pendidikan yang dikelola BLUD	3 SMKN	3 SMKN	1,210,000,000	3 SMKN	1,270,500,000	3 SMKN	1,334,025,000	3 SMKN	1,400,726,250	3 SMKN	1,470,762,563	100%	6,686,013,813		
				16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah generasi muda yang ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kota Banda Aceh 75%	37%	50%	636,250,000	65%	531,875,000	75%	576,530,750	85%	825,225,488	95%	878,341,782	95%	3,448,223,020		
				16 01	- Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah OKP yang dibina	270 OKP	54 OKP	307,850,000	54 OKP	170,635,000	54 OKP	179,166,750	54 OKP	188,125,088	54 OKP	197,531,342	270 OKP	1,043,308,179		
				16 02	- Pendidikan dan pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah peserta diklat kepemimpinan Pemuda dan OSIS Kota Banda Aceh	500 Orang	100 Orang	124,300,000	100 Orang	136,730,000	100 Orang	150,403,000	100 Orang	165,443,300	100 Orang	181,987,630	500 Orang	758,863,930		DISDIKPORA
				16 05	- Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan Narkoba bagi Generasi Muda	40 Orang	100 Orang	84,300,000	100 Orang	92,730,000	100 Orang	102,003,000	100 Orang	112,203,300	100 Orang	123,423,630	500 Orang	514,659,930		
				16 10	- Pembinaan Pemuda Bela Negara	Jumla Peserta Pembinaan Pemuda Bela Negara	340 Orang	60 Orang	17,575,000	68 Orang	19,332,500	69 Orang	21,265,750	71 Orang	23,392,325	72 Orang	25,731,558	340 Orang	107,297,133		
				16 12	- Pelatihan KMD/KML Bagi Pemuda Gudep Pramuka	Jumlah Pelatihan Dasar Pramuka	50 Orang	75 Orang	102,225,000	81 Orang	112,447,500	85 Orang	123,692,250	89 Orang	336,061,475	95 Orang	349,667,623	425 Orang	1,024,093,848		
		16 3 2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup	Jumlah generasi muda yang menjadi enterprener meningkat hingga 50%	-	50%	56,859,000	60%	150,544,900	66%	158,072,145	74%	165,975,752	82%	350,758,000	95%	882,209,797		DISDIKPORA		
			- PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEMUDA	Jumlah Peserta Pelatihan Ketrampilan Pemuda	-	20 orang	56,859,000	25 orang	150,544,900	30 orang	158,072,145	35 orang	165,975,752	40 orang	350,758,000	240 Orang	882,209,797				
		20 3 3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga diKota Banda Aceh	60%	63%	1,547,269,000	65%	1,271,995,900	70%	1,335,595,695	63%	1,402,375,480	65%	1,831,187,286	80%	7,388,423,361				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Menjadikan Masyarakat mencintai dan gemar Olahraga			17	- PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT	Jumlah peserta sosialisasi dan peserta lomba cabang OR tradisional yang berkembang di masyarakat	35 Org/ 410 Peserta Lomba	110 Orang	739,184,000	110 Orang	113,102,400	110 Orang	118,757,520	110 Orang	124,695,396	110 Orang	130,930,166	550 Orang	1,226,669,482	DISDIKPORA
			18	- PENYELENGGARAAN LIGA PENDIDIKAN INDONESIA (LPI)	Jumlah Atlit Sepak bola liga pelajar indonesia (LPI)	50 Pemain	50 Pemain	242,199,000	50 Pemain	366,418,900	50 Pemain	384,739,845	50 Pemain	403,976,837	50 Pemain	480,900,000	250 Pemain	1,878,234,582	
			19	- Seleksi Olahraga Usia Dini antar Gugus SD	Jumlah cabang olahraga yang diperlombakan	15 Cabang	4 Cabang	85,686,000	5 Cabang	104,254,600	6 Cabang	109,467,330	7 Cabang	114,940,697	9 Cabang	262,823,870	31 Cabang	677,172,497	
			20	- SELEKSI DAN KEIKUTSERTAAN PADA OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) SD/SMP/SMA/SMK SEDERAJAT	Jumlah Cabang Olahraga yang ikut O2SN	17 Cabang	17 Cabang	392,720,000	17 Cabang	581,992,000	17 Cabang	611,091,600	17 Cabang	641,646,180	17 Cabang	689,753,200	17 Cabang	2,917,202,980	
			20 21	- SELEKSI DAN KEIKUTSERTAAN PADA FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONBAL (FLS2N)	Jumlah siswa pada FLS2N	22 Siswa	22 Siswa	87,480,000	22 Siswa	106,228,000	22 Siswa	111,539,400	22 Siswa	117,116,370	22 Siswa	266,780,050	110 Siswa	689,143,820	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		-	-	-	6 Gampong	613,136,550	7 Gampong	674,450,205	9 Gampong	741,895,226	10 Gampong	899,527,854	31 Gampong	2,929,009,835	
				Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana Olahraga	Meningkatnya pola kemitraan antara pemerintah dgn masyarakat	-	-	-	6 Gampong	613,136,550	7 Gampong	674,450,205	9 Gampong	741,895,226	10 Gampong	899,527,854	31 Gampong	2,929,009,835	
						15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		80%	100%	24,085,000	100%	50,000,000	100%	52,500,000	100%	57,750,000	100%	
			15 11	- Keikut Sertaan Dalam Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)	Terlaksananya Pameran HAI Tk. Provinsi	1 Event	1 Event	24,085,000	1 Event	50,000,000	1 Event	52,500,000	1 Event	57,750,000	1 Event	63,525,000	1 Event	247,860,000	
								48,246,781,455		50,659,120,528		52,906,188,955		58,187,807,850		64,251,254,652		274,251,153,441	